

**DAMPAK ANAK PUTUS SEKOLAH TERHADAP
PEMBANGUNAN NAGARI DI KENAGARIAN GANGGO
HILIR KECAMATAN BONJOL KABUPATEN
PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Sebagai Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S1)*



Oleh :

RIMA DEFITRI
NIM. 2003/44604

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Dampak Anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari Di
Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman
Nama : Rima Defitri
NIM : 2003 / 44604
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu – Ilmu Sosial

Padang, 27 Maret 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurman S, M.Si
NIP. 131 460 200

Junaidi Indrawadi S.Pd, M.Pd
NIP. 132 319 803

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Poilitik Fakultas Ilmu- Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari jumat 27 Maret 2009 pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

Dampak Anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari Di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman

Nama : Rima Defitri
NIM : 2003 /44604
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu – Ilmu Sosial

Padang, 27 Maret 2009

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Nurman. S, M.Si	_____
Sekretaris	: Junaidi Indrawadi S.Pd, M.Pd	_____
Anggota	: Dra. Maria Montessori M.Ed,M.Si	_____
Anggota	: Dra. Al Rafni M.Si	_____
Anggota	: Dra. Aina	_____

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP,

Prof. Dr. H Azwar Ananda, MA
NIP. 131 584 117

ABSTRAK

RIMA DEFITRI : BP 2003/44604. DAMPAK ANAK PUTUS SEKOLAH TERHADAP PEMBANGUNAN NAGARI DI KENAGARIAN GANGGO HILIR KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN.

Penelitian ini mengungkapkan Dampak Anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari Di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa di Kenagarian Ganggo Hilir banyak terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah. Salah satu faktornya adalah permintaan orangtua dan keinginan dari anak itu sendiri dengan alasan mereka ingin bekerja yang dapat membantu ekonomi keluarga. Akibatnya makin rendah tingkat pendidikan masyarakat di kenagarian Ganggo Hilir dan sangat berpengaruh kepada pembangunan nagari yang telah direncanakan, pembangunan akan berjalan apabila masyarakat mempunyai pendidikan dan mampu menerima pembaharuan dalam sebuah nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dampaknya anak - anak putus sekolah terhadap Pembangunan Nagari. Untuk mengidentifikasi dampak anak putus sekolah terhadap pembangunan nagari di Kenagarian Ganggo Hilir.

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Adapun informan dipilih secara sengaja (purposive sampling) yaitu orang yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan penelitian, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menggambarkan dan menyimpulkan bahwa di Kenagarian Ganggo Hilir pembangunan nagari belum terlaksana semuanya di karenakan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pembangunan Nagari, maka dari itu tidak terjadi pembaharuan pembangunan dalam nagari serta masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan anak – anak di Kenagarian Ganggo Hilir yang akan menyebabkan pembangunan nagari tidak efektif dan program pemerintah tidak dapat terlaksana seutuhnya.

Kata kunci : anak Putus sekolah dan pembangunan nagari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Adapun permasalahan penulis angkat disini adalah mengenai fenomena dan realita yang terdapat dilingkungan sekitar tempat tinggal penulis, yakni:

“DAMPAK ANAK PUTUS SEKOLAH TERHADAP PEMBANGUNAN NAGARI DI KENAGARIAN GANGGO HILIR KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini atau tugas akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan, saran serta dorongan dari berbagai pihak juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Nurman S M.Si, selaku Pembimbing I penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Junaidi Indrawadi S.Pd, M.Pd, selaku Pembimbing II penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Dra. Runi Hariantati, M. Hum selaku Penasehat Akademik penulis.

4. Ibuk Dra. Maria Montessori M.Ed,M.Si, selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Ibuk Dra. Al Rafni M.Si, selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Ibuk Dra. Aina, selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Usaha maksimal telah penulis lakukan untuk kesempurnaan skripsi ini namun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan ini. Akhir kata penulis sangat mengharapkan saran serta kritik dari semua pihak yang bersifat membangun demi terciptanya kesempurnaan penelitian ini dan juga bisa menjadi bahan acuan bagi penulis pada masa mendatang

Padang, Maret 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A . Kajian Teoritis.....	12
a. Pengertian Pembangunan Nagari	12
b. Dampak Anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari di Kenagarian Ganggo Hilir.....	16
c. Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah.....	20
B . Kerangka konseptual	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Informan Penelitian.....	28
D. Jenis, Sumber,Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	30
E. Uji Keabsahan Data	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 36
A. Hasil Penelitian.	36
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
2. Faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kenagarian Ganggo Hilir.....	45
3. Dampak Anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari diKenagarian Ganggo Hilir Kec bonjol Kabupaten Pasaman	60
B. Pembahasan.....	65
 BAB V PENUTUP	 72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 4.1 : Pembagian luas wilayah jorong yang ada di Kenagarian Ganggo Hilir

Tabel 4.2 : Jumlah penduduk dirinci menurut umur dan jenis kelamin yang ada di
Kenagarian Ganggo Hilir

Tabel 4.3 : Mata Pencaharian penduduk di Kenagarian Ganggo Hilir

Tabel 4.4 : Prasarana Pendidikan Formal yang ada di Kenagarian Ganggo Hilir

Tabel 4.5 : Gambaran anak putus sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke
tingkat berikutnya

Tabel 4.6 : Jumlah anak yang putus sekolah di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan
Bonjol Kabupaten Pasaman

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Gambar Wawancara Peneliti dengan Informan

Lampiran 3 : Gambar kegiatan anak yang putus sekolah

Lampiran 4 : Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial

Lampiran 6 : Surat Izin penelitian dari Kantor Kesbang dan Limnas Kabupaten

Pasaman

Lampiran 7 : Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (*MUSRENBANG*) Nagari

Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tahun 2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan pembangunan dibidang pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan itu maka disusunlah Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 yaitu terdapat pada Bab II pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara demokrasi dan bertanggung jawab.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Intensifnya pembangunan pendidikan kurun waktu tiga tahun terakhir, telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan. Diawali dengan menetapkan berbagai kebijakan menyangkut pendidikan serta kenaikan anggaran pendidikan dari sumber dana APBD Provinsi yang relatif besar sejak tahun 2006, ini merupakan komitmen

yang serius pada Pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sektor pendidikan.

Pemikiran strategis yang melandasi ditetapkan pembangunan sektor pendidikan penopang utama pengembangan SDM yang berkualitas, pada hakekatnya merupakan perwujudan cita-cita mulia untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana memperkuat dan mengembangkan strata sosial masyarakat yang relegius, berbudaya dan berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan nasional dan global. Konsepsi ini diilhami dari sebuah realitas sejarah dan pengalaman empiris, bahwa masyarakat lebih mampu meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan potensi SDM yang dimiliki.

Agar pembangunan sektor pendidikan, termasuk pengembangan pembinaan kepemudaan dan olahraga Sumatera Barat 2006-2010 memiliki arah dan tujuan jelas serta memiliki korelasi yang kuat dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka Pemerintah Sumatera Barat telah menetapkan tiga pilar pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2006-2010 yakni :

1. Pilar Pertama : Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan.

Pilar ini memberikan arah orientasi pengembangan akses pendidikan Sumatera Barat ditekankan pada upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu, khususnya bagi penduduk usia sekolah 13-15 tahun, serta perintisan Wajib

Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun bagi penduduk usia sekolah 16-18 tahun.

2. Pilar Kedua : Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing.

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada program kegiatan yang memfasilitasi pengembangan mutu input (mutu guru, mutu sarana dan prasarana pendidikan), Mutu proses belajar dan mengajar. Diharapkan hasil pengembangan mutu input dan proses ini memberikan dampak terhadap peningkatan mutu output. Sedangkan relevansi pendidikan diarahkan pada pengembangan keseimbangan rasio antara siswa SMK dengan SMA, pengembangan materi sesuai kebutuhan lokal (daerah), dan terakhir daya saing diarahkan pada pengembangan Sekolah Unggul, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Sekolah Berstandar Nasional (SSN) termasuk peningkatan intensitas lomba akademik, olahraga dan kesenian berskala nasional maupun internasional.

3. Pilar Ketiga : Tatakelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

Pilar ketiga ini diarahkan agar penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat berorientasi pada perwujudan misi pembangunan Sumatera Barat, yakni pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 menjamin otonomi desa/ nagari dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun otonomi memberikan banyak peluang: mengatur diri sendiri, mengelola sumber

daya desa/nagari, dan keuangan desa, semua hak ini disertai tanggung jawab. Tidak ada hak atau tanggung jawab, yang ada hanyalah hak dan tanggung jawab. Dalam Otonomi Desa / nagari, Pemerintah Desa / nagari bertanggung jawab pada masyarakat desa/ nagari dan karena itu harus melaksanakan pemerintah yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab.

Agar tujuan pendidikan dapat tercapai pemerintah berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari kota sampai ke pelosok desa terpencil guna memudahkan anak-anak dalam proses belajar. Meskipun usaha demikian telah dilakukan pemerintah, tetapi masih cukup banyak dijumpai anak-anak yang putus sekolah. Mereka umumnya hanya berpendidikan SD dan SMP.

Peningkatan pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin dari sumber dana APBD Provinsi selama tiga tahun terakhir berhasil menurunkan angka putus sekolah di Sumatera Barat. Namun angka putus sekolah dapat ditekan. Tabel berikut gambaran persentase putus sekolah tiga tahun terakhir.

Tabel : PERSENTASE SISWA PUTUS SEKOLAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2005/2006 -2007/2008

No	Satuan / Jenjang Pendidikan	Persentase Anak Putus Sekolah		
		2005/2006	2006/2007	2007/2008
1	SD	0.51 %	0.32 %	0.26 %
2	SMP	1.49 %	1.43 %	0.92 %
3	SMA	1.43 %	1.26 %	0.99 %
4	SMK	2.52 %	2.41 %	1.68 %

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

Sejak tahun 2006 Pemerintah Sumatera Barat setiap tahunnya memberikan 28.430 beasiswa bagi siswa SMP/MTs dari keluarga miskin,

bantuan biaya pendidikan bagi 115 lulusan SLTA melanjutkan pendidikannya ke 5 (lima) PTN ternama di Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alwen Bentri dkk, (2006) Faktor eksternal yang banyak menyebabkan anak putus sekolah sebagian besar adalah karena faktor kesulitan ekonomi, sehingga orangtua meminta anak untuk berhenti sekolah karena tenaganya diperlukan untuk membantu mencari nafkah. Dan ada pula dikeluarkan oleh sekolah karena sering bolos atau tidak masuk sekolah, pelajaran sulit dan tidak dapat dipahami, faktor teman sebaya yang banyak tidak sekolah. Disamping itu ada juga mengatakan bahwa ia merasa takut sekolah karena sering diganggu oleh temannya.

Secara umum kehidupan anak-anak yang putus sekolah pada tingkat Pendidikan dasar tergantung pada orangtua dan mereka sendiri. Orangtua memiliki persepsi yang bervariasi tentang kemampuan dan kemauan anak untuk belajar disekolah. Sebagian orangtua menyatakan bahwa anaknya bersekolah atas kemauannya sendiri, tapi dana untuk sekolah tersebut tidak ada dan buku pelajaran tidak lengkap karena tidak ada uang untuk membeli buku.

Setiap orangtua menginginkan anak - anaknya cerdas, berwawasan luas dan bertingkah laku baik, berkata sopan dan kelak suatu hari anak-anak mereka bernasib lebih baik dari mereka baik dari aspek kedewasaan pikiran maupun kondisi ekonomi. Oleh karena itu, di setiap pikiran para orang tua bercita-cita menyekolahkan anak-anak mereka supaya berpikir

lebih baik, bertingkah laku sesuai dengan agama serta yang paling utama sekolah dapat mengantarkan anak - anak mereka ke pintu gerbang kesuksesan sesuai dengan profesinya.

Ketidakmampuan untuk meneruskan pendidikan anak berakibat kepada makin meningkatnya angka anak putus sekolah. Bagian terbesar mereka adalah anak-anak putus sekolah atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Sesuai dengan pendapat Idris (1994: 59) terdapat 11 juta anak putus sekolah setiap tahunnya. Hal ini jelas tidak mendukung terhadap program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah tahun 1994, melalui Inpres No. 1 Tahun 1994 yang berbunyi “ wajib belajar usia sekolah suatu gerakan Nasional yang diselenggarakan diseluruh Indonesia yang berumur 7 s/d 15 tahun mengikuti usia sekolah atau setara sampai tamat.

Sekolah bersifat *life- centered* Yang menjadi pokok pelajaran ialah kebutuhan manusia, masalah-masalah dan proses-proses sosial dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat dipandang laboratorium dimana anak belajar menyelidiki dan turut serta dalam usaha-usaha masyarakat yang mengandung unsur pendidikan. Sekolah mengikutsertakan orang banyak dalam proses pendidikan dalam mempelajari problema-problema sosial. Dengan demikian terbukalah pintu antara sekolah dengan masyarakat dapat ikut memasuki sekolah. Syauckani (2002,8-9).

Di Minangkabau terdapat daerah yang disebut Nagari, nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pembangunan nagari dikenagarian Ganggo Hilir merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara bersamaan pada tiap-tiap jorong yang terdapat dalam kenagarian Ganggo Hilir. Pembangunan yang telah direncanakan mencakup bidang pendidikan, agama, ekonomi dan sosial. Salah satu program pembangunan dibidang pendidikan adalah pembangunan gedung sekolah (MDA), pelatihan Bordir. Pembangunan dibidang agama yaitu perehapan mesjid dan mushala. Dan dibidang ekonomi dan sosial adalah pembangunan dibidang pengadaan bibit kayu Gaharu, pelatihan bengkel dan perehapan rumah miskin serta perehapan tempat bersejarah. (lengkapnya terlampir)

Kenagarian Ganggo Hilir adalah salah satu daerah yang di payungi oleh tingginya adat istiadat, di Kenagarian Ganggo Hilir sarana untuk menunjang pendidikan masyarakat seperti SD, SLTP, SMA sudah lama berdiri. Namun banyak sekolah yang ada di Kenagarian itu tidak cukup untuk menambah semangat masyarakat untuk memperoleh pendidikannya. Anak – anak atau remaja di Kenagarian Ganggo Hilir banyak yang putus sekolah dan banyak yang tidak sekolah, pada umumnya anak-anak yang

telah lulus SLTP tidak melanjutkan ke SLTA dan berhenti di bangku SLTA Berumur (13-18) yaitu terdapat sekitar 150 anak dalam jangka waktu 1 tahun. Dampak dari banyaknya anak-anak yang putus sekolah, mereka banyak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat diantaranya : 1 kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah dan 3 orang anak yang terjerat kasus narkoba (*sumber dari kantor wali nagari Ganggo Hilir kec Bonjol Kabupaten Pasaman pada tahun 2008 dalam waktu 1 tahun*).

Pada umumnya anak-anak tersebut tidak bersekolah atau berhenti sekolah berawal dari orang tua mereka yang tidak mampu untuk membiayai sekolah mereka dan juga disebabkan karena rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki. Untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan meresahkan itu terjadi maka di harapkan agar anak-anak yang ada di Kenagarian Ganggo Hilir tetap bersekolah.

Selain orangtua, masyarakat juga ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan. Negara telah banyak memfasilitasi dengan didirikan bangunan sekolah, guru-guru, serta kelengkapan lainnya. Namun hal tersebut tidak akan bermanfaat jika masyarakat itu sendiri tidak peduli akan pendidikan. Tapi hal tersebut terjadi berawal dari kemiskinan masyarakat. Padahal dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 disebutkan “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya”.

Dilihat dari rencana pembangunan yang telah ada saat ini salah satunya pembangunan sekolah yang mana digunakan untuk menunjang kelancaran pendidikan, dan bidang ekonomi dan sosial diharapkan dapat membantu mencegah anak-anak putus sekolah dan dapat menggali sumber ekonomi yang ada di Kenagarian Ganggo Hilir.

Dari fenomena yang diuraikan diatas penulis tertarik meneliti bagaimana Dampak Anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman

B. IDENTIFIKASI, PEMBATASAN, PERUMUSAN MASALAH

1. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi yang menjadi permasalahan adalah

- a. Bagaimanakah Dampak anak putus sekolah tersebut terhadap Pembangunan nagari di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.
- b. Hambatan yang di temui masyarakat dalam mencegah anak putus sekolah di Kenagarian Ganggo Hilir kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti perlu membatasi permasalahanya yaitu bagaimana Dampak anak putus sekolah terhadap Pembangunan nagari dan apa saja hambatan yang ditemui oleh masyarakat dalam mencegah anak putus sekolah di Kenagarian Ganggo Hilir

Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Alasan peneliti memilih objek penelitian di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman adalah karena disana banyak ditemui anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan lagi Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Dampak anak putus sekolah terhadap pembangunan nagari di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

C. FOKUS PENELITIAN

Adapun yang menjadi fokus Penelitian pada penelitian ini adalah Dampak anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah dampak anak putus sekolah terhadap pembangunan Nagari di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemui oleh masyarakat dan pemerintah dalam mencegah anak putus sekolah di kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat penelitian secara teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap Ilmu Pendidikan.
2. Manfaat penelitian secara praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Masyarakat agar lebih memperhatikan jalannya Pendidikan di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.
3. Sebagai bahan rujukan bagi pihak yang ingin mengadakan penelitian yang sama dan lebih komplit dari penelitian

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. KAJIAN TEORI

a. Pengertian Pembangunan Nagari

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007 yaitu tentang pemerintahan nagari, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari tidak hanya dilihat sebagai wilayah administrasi Pemerintahan akan tetapi dimaknai pula sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Minangkabau dalam hal mana seluruh warga masyarakat secara bersama-sama mengembangkan potensi Nagari (sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan) serta mengembangkan nilai-nilai syarak, adat dan budaya di Nagari, sesuai falsafah *adat salingka Nagari dan Adat sebatang panjang* untuk tercapainya dan suksesnya

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan anak Nagari.

Hal tersebut sangat beralasan sekali mengingat konsep pelaksanaan pembangunan di segala bidang dapat terealisasi dengan baik bila mendapat dukungan dari semua unsur termasuk masyarakat. Salah satu contohnya rencana untuk membangun nagari yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nagari.

Berkaitan dengan rencana pembangunan itu, diperlukan persamaan persepsi serta terobosan secara pro aktif oleh seluruh masyarakat serta melakukan evaluasi terhadap program yang tengah dijalankan dan melakukan koordinasi sesuai dengan aturan yang ada. Program-program mendukung terwujudnya visi telah tertuang dalam program sementara. Tanpa dukungan masyarakat dan SDM andal, bisa jadi program terhambat. Kepada seluruh lapisan masyarakat untuk proaktif melakukan koordinasi serta terobosan mendukung terwujudnya program pembangunan nagari tersebut

Pembangunan adalah merupakan suatu proses yang bersifat multidimensional yang struktural yang meliputi segala aspek kemasyarakatan, namun dalam permulaan lebih banyak ditekankan pada bidang ekonomi Jhansen (1970:5). Di sisi lain Todaro (1977:18) berpendapat bahwa pembangunan itu adalah merupakan suatu proses yang berdomensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi.

Selain meningkatkan pendapatan dan output, disamping itu pembangunan berurusan dengan perubahan yang mendasar tentang kelembagaan sosial dan struktural administrasi serta sikap masyarakat dan malah menyangkut masalah kebiasaan dan kepercayaan. Senada dengan Pendapat Jhingan (1975:9) berpendapat bahwa pembangunan bukanlah sekedar masalah, pembangunan memiliki sejumlah aspek perilaku masyarakat, penegakkan hukum dan ketertiban dalam hubungan bisnis dan termasuk juga hubungan keluarga, buta huruf dan sebagainya.

Hasil dari proses pembangunan akan terlihat dari perbaikan tingkat masyarakat baik secara materil maupun moril. Dari sisi materil pembangunan akan terlihat dari peningkatan produktivitas serta peningkatan pendapatan sedangkan dari aspek moril akan dapat dilihat dari segi keamanan, harga diri serta kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.

Pernyataan ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Todaro (1977: 14) bahwa pembangunan itu terdiri dari 3 nilai inti yaitu :

1. Nafkah hidup.
2. Menghargai diri sendiri.
3. Kebebasan.

Dengan demikian proses pembangunan tidak bisa dilihat dengan menggunakan indikator sosial karena dalam pembangunan tersebut bersifat multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Seharusnya pembangunan bertujuan untuk terciptanya perbaikan kualitas hidup bagi semua orang. Perubahan sosial yang terjadi hendaknya dapat semua orang hidup layak. Pembangunan yang selalu menempatkan dimensi ekonomi sebagai pertimbangan dominan, akan cenderung menepatkan faktor lingkungan sebagai penghambat pembangunan. Padahal arah yang harus dituju adalah mengharnomiskan antara pembangunan ekonomi dengan lingkungan. Harry Peorwanto (2000:161).

Gusmal (2007: 67) selain orangtua masyarakat juga bertanggung jawab memajukan pendidikan. Yang dibutuhkan bukan hanya pendidikan masyarakat, masyarakat pendidikan juga dibutuhkan. Pemerintah berusaha memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ribuan sekolah dibangun, jutaan guru diangkat. Beragam sarana dan prasaran dilengkapi. Semua itu disediakan untuk masyarakat rakyat Indonesia. Namun semua tidak akan banyak manfaatnya kalau masyarakat yang memahami pendidikanlah yang akan membantu memajukan pendidikan. Jika masyarakat tidak memahami akan pentingnya pendidikan, maka tanpa disadari masyarakat sebenarnya ikut menghancurkan pendidikan.

Masyarakat yang memahami pentingnya pendidikan akan ikut mendorong kemajuan pendidikan. Pemimpin informal yang ada di tengah-tengah masyarakat memiliki peran penting. Di MinangKabau, ada niniak mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, serta tokoh masyarakat lainnya. Kalau masing-masing mampu memperlihatkan perannya, maka pendidikan akan maju.

b. Dampak Anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari.

Pembangunan adalah perubahan dan kebudayaan adalah upaya manusia untuk menyempurnakan diri dalam kondisi kehidupannya. Pada tahap lepas landas pembangunan Indonesia, implikasi perubahan yang terjadi pada berbagai dimensi kehidupan semakin kompleks. Sementara itu tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan menjadi semakin rumit, karena cakupannya tidak hanya semata ekonomi, melainkan juga terkait dengan kendala biogeofisik dan sosial budaya. Harry Peorwanto (2000:161).

Pembangunan merupakan perubahan sosial dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik. Karena tujuan dasarnya adalah proses pembangunan itu sendiri, yang proses pembangunan mengizinkan pengorbanan-pengorbanan berbagai dimensi kemanusiaan. Pembangunan yang tujuannya merubah kondisi sosial menjadi lebih baik yang dilaksanakan dengan cara pemberdayaan ekonomi. Dengan kata lain pembangunan hanya sekedar membebaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan ekonomi tetapi membebaskan juga masyarakat dari ketertinggalan Ilmu pengetahuan. Mohtar Mas'oed (1997).

Oleh sebab itu pembangunan terdiri dari 2 aspek yaitu :

a. Aspek Fisik.

Suatu pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan biofisik semata. Melainkan pula faktor sosial budaya (Soemarwoto,1991:17). Dalam upaya membangun selalu ada

kecenderungan keinginan manusia untuk merubah lingkungannya. Sementara itu perubahan suatu lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia, baik itu menguntungkan atau sebaliknya.

Masyarakat bukan hanya sebagai objek semata melainkan juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam pembangunan yang dalam upaya pembangunan harus selalu memperhatikan kondisi sosial ekonomi warga masyarakat. Daerah pedesaan adalah tumpuan segala bentuk program pembangunan, atau dengan kata lain disamping sebagai objek juga diharapkan sebagai subjek dalam pembangunan. Harry Poerwanto (2000:167).

Dewasa ini orientasi pembangunan Indonesia masih pada pertumbuhan yang memadai. Gerakan pengentasan masyarakat miskin masih jelas terlihat didominasi pemerintah, belum menjadi gerakan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih mengalami banyak rintangan seperti perizinan yang lambat, maka arus pembangunan makin berkualitas ke wilayah-wilayah terbelakang, pemerintah harus makin berperan dalam meningkatkan sumber daya alam yang cocok di wilayah tersebut. Dengan demikian makin jelas posisi pembangunan pedesaan dewasa ini yang mana kebijakan-kebijakan masih bersifat lunak atau lambat, yang beberapa hal dapat merugikan masyarakat desa dalam jangka panjang. Mohtar Mas'ood (1997)

Sementara itu untuk tercapainya tujuan pembangunan di Nagari atau desa ada potensi dan kendala yang perlu diperhitungkan. Adalah suatu kenyataan yang tak terelakkan bahwa suatu *input* baru pembangunan telah dan akan menyentuh soal nilai-nilai. Oleh karena itu dalam rangka pengembangannya suatu intervensi dalam rangka untuk penyempurnaannya akan dapat dilakukan secara tepat apabila berbagai proses yang terjadi dalam pembangunan juga dinilai sebagai unsur yang sama pentingnya dengan program itu sendiri. Selain itu proses pembangunan nagari atau desa diharapkan mampu di percepat bila keterkaitan berbagai sektor kehidupan juga diperhatikan. Harry Poerwanto (2000:167).

Jika perkembangan ekonomi yang diperoleh melalui pembangunan tanpa menyentuh prinsip-prinsip etika pembangunan yang mendasarinya maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak akan menghasilkan kualitas hidup. Seperti pembangunan gedung sekolah, apabila gedung sekolah terutama pada ruang kelas. Ruangan harus memenuhi syarat kesehatan yaitu : *pertama*, ruangan harus ada jendela, ventilasi cukup, udara segar dapat masuk ruangan, sinar matahari dapat menerangi ruangan. *Kedua*, dinding harus bersih dan putih tidak terlihat kotor. *Ketiga*, lantai tidak becek, licin atau kotor. *Keempat*, keadaan gedung yang jauh dari tempat keramaian. Apabila tempat sekolah tersebut tidak layak untuk ditempati maka pemerintah harus memperbaikinya. Harry Poerwanto (2000:161).

b. Aspek mental

Pembangunan dari segi mental adalah pembangunan yang berasal dari dalam diri anak-anak tersebut. Yang mana keinginan atau motivasi dari dalam diri untuk ingin lebih maju dan dapat mengikuti pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Proses pendidikan hendaknya dilakukan tidak sekedar mempersiapkan anak-anak untuk hidup dimasa kini. Tetapi mereka juga harus mempersiapkan untuk hidup dimasa depan. Karena mereka adalah manusia yang dipersiapkan untuk hidup dimasa depan. Masa depan adalah masa yang semakin bertambahnya tantangan dan semakin sulit diprediksi karakteristiknya. Suyanto (2001).

Gaffar (1994:8) memberikan arti : pendidikan yang pada dasarnya mempunyai fungsi untuk mengembangkan potensi manusia agar tumbuh menjadi matang. Dengan pengembangan potensi maka manusia akan mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam memperbaiki kehidupan. Menurut Brown Pendidikan merupakan proses pengendalian secara sadar dimana perubahan-perubahan didalam tingkah laku dihasilkan didalam diri orang itu melalui dalam kelompok. Dari pandangan ini Pendidikan merupakan suatu proses yang dimulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup.

Pendidikan memerlukan kesiapan rohani, ketenangan dengan baik. Jika hal-hal tersebut ada pada diri anak maka belajar sulit dapat

masuk. Motivasi merupakan faktor yang berfungsi menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajar atau pendidikan. Seorang anak yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih tidak mau menyerah tapi sebaliknya mereka yang motivasinya lemah tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, suka mengganggu dikelas, sering meninggalkan pelajaran akibatnya banyak mengalami kesulitan belajar. Abu Ahmadi (2003 : 83)

c. Faktor-faktor Penyebab anak putus sekolah.

Kamus Bahasa Indonesia (1995), putus sekolah diartikan belum tamat sekolah atau berhenti sekolah. Anak Putus Sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Anak Putus sekolah yang dimaksud adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai.

Menurut Marzuki dalam Khairuddin (2001;39) seorang siswa dikatakan putus sekolah apabila dia tidak menyelesaikan sesuatu program sekolah secara utuh sebagai suatu sistem. Yusuf dalam Khairuddin (2001;39) mengatakan orang putus sekolah atau droup out adalah orang yang keluar dari sistem pendidikan sebelum mereka menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan sistem persekolahan tersebut. Dengan

demikian putus sekolah berarti keluar atau berhentinya dari sekolah sebelum dapat menyelesaikan pendidikan yang diikutinya.

Elfindri dalam Khairuddin (2001;39) berbeda dengan pendapat tersebut, dia mengatakan bahwa anak putus sekolah kalau ia pernah duduk pada salah satu tingkat pendidikan tetapi keluar atau berhenti sebelum menamatkan pendidikannya. Dia juga bisa mengartikan putus sekolah tapi kalau anak telah menamatkan SD tetapi tidak melanjutkan ke tingkat yang berikutnya artinya seorang anak yang tamat SD tidak melanjutkan ke SLTP.

Elfindri dalam Khairuddin (2001;40) sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hadiyanto, yang mengkaitkan putus sekolah dengan wajib belajar 9 tahun. Anak tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTP dapat di kategorikan Putus sekolah mereka hanya menyelesaikan pendidikan 6 tahun dari program yang seharusnya diikuti 9 tahun.

Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak putus sekolah. Penelitian Thaher juga terdapat dalam Khairuddin (2001; 41) mengemukakan beberapa faktor penyebab putus sekolah.

- a. Pendidikan kurang berhasil
- b. Kurikulum pendidikan tidak relevan dengan keadaan masyarakat yang dinamis.
- c. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah.
- d. Metodologi pengajaran yang kurang menarik para siswa.

- e. Jauhnya jarak sekolah dari tempat tinggal siswa sehingga membuat mereka malas.

Garrison menjelaskan bahwa seorang anak yang keluar dari sekolah sebelum ia lulus lebih banyak dipengaruhi lingkungan. Lingkungan sosial tempat siswa berinteraksi mempengaruhi aktifitas pendidikannya, terutama teman sebaya dalam lingkungan sosial mereka, Syarif dalam Khairuddin (2001;43) bahwa maju mundurnya pendidikan anak disekolah banyak dipengaruhi oleh faktor masyarakat terutama kelompok sebaya yang melakukan kegiatan bersama disekolah dan luar sekolah (dilingkungan keluarga).

Disamping itu faktor penyebab anak putus sekolah dapat dari prestasi yang jelek atau rendah Marzuki dalam Syaukani (2002;50) dari prestasi yang rendah yang mudah itu ada siswa yang langsung putus sekolah.

Jamal mengemukakan faktor lain penyebab putus sekolah karena tidak menyelesaikan pendidikan. Mungkin disebabkan karena kurang berminat, bosan, kurang kemampuan akademik, sehingga sukar bagi mereka melihat pendidikan disekolah itu kurang relevan dengan kebutuhan hidup mereka. Sementara Hadiyanto dalam Khairuddin (2001;46) menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak putus sekolah adalah kepribadiannya yang mengarahkan kepada kondisi yang negatif.

4 (empat) faktor penyebab utama anak putus sekolah yang dikemukakan Marzuki Dalam Syaukani (2002;50) yaitu :

- a) Faktor sosial budaya ; yaitu terutama sikap dan pandangan orang tua terhadap pendidikan anak
- b) Faktor ekonomi ; tenaga anak digunakan untuk membantu ekonomi keluarga yaitu bekerja membantu orangtua mereka yang miskin dan pekerjaan itu mengakibatkan anak tidak sekolah.
- c) Faktor pribadi anak ; kecerdasan, minat dan motivasi yang ada dalam diri anak yang berpengaruh terhadap kelancaran sekolahnya.
- d) Faktor sekolah ; misalnya masa belajar terlalu lama, disipilin terlalu kaku atau ketat dan cara belajarnya yang tidak dinamis.

Syaukani (2002; 58-59) mengungkapkan bahwa penyebab anak putus sekolah bisa disebabkan oleh ketidakadilan sosial pendidikan. Hal tersebut dapat terjadi manakala kepentingan umum terlalu diutamakan dari kepentingan individu, sebagai konsekuensi dan asumsi masyarakat bahwa kebersamaanlah yang terpenting bukan individualisme alasannya manusia baru menjadi manusia karena manusia lain.

Ketidakadilan sosial juga nampak pada konsep pendidikan anak didik. Hal ini dilihat dari berbagai kenyataan berikut :

1. Pendidikan bagi golongan atas dalam strata sosial menyebabkan anak-anak dari golongan atas (kaya) saja yang memperoleh pendidikan Formal. Pendidikan macam ini dinamakan pendidikan elitis yang berasumsi dapat melakukan pembaharuan.
2. Pendidikan bagi golongan atas dalam strata intelektual khusus bagi anak berbakat; program ini walaupun cukup pedagogis, namun tidak

adil bagi anak-anak kurang berbakat yang merupakan populasi terbesar masyarakat kita.

3. Pendidikan berorientasi pada nilai ekonomi dan bisnis, menyebabkan banyak anak-anak usia sekolah yang tidak mengeyam pendidikan kerana alasan ekonomi. Sementara itu para pengambil kebijakan pendidikan belum menyediakan wadah yang representatif bagi pembinaan generasi muda bangsa ini yang tidak mampu mengeyam bangku pendidikan akibatnya relasi antar manusia sejati yang sangat potensial bagi terwujudnya relasi pedagogis semakin ditandai oleh sifat non-personal, yang menyebabkan relasi akan menjadi semakin keras dan orang cenderung semakin potensial menjadi manipulator.
4. Ketidakadilan sosial akibat keterbatasan daya tampung pendidikan menyebabkan pemerintah dan swasta harus melakukan seleksi masuk ke jenjang pendidikan diatasnya secara ketat. Persoalannya adalah siswa atau anak yang diterima atau gagal masuk sekolah kurang diwadahi secara proporsional dalam bingkai pembangunan pendidikan bernuansa keadilan.

Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk di pecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ketika membicarakan peningkatan ekonomi keluarga terkait bagaimana meningkatkan Sumber Daya Manusia nya (SDM). Sementara semua solusi yang diinginkan tidak

akan lepas dari kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh, sehingga kebijakan Pemerintah berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat.

Penelitian UNESCO terdapat dalam Syauckani berkesimpulan bahwa putus sekolah dapat disebabkan kondisi sosial ekonomi yang jelek. Faktor ekonomi yang demikian itu berpeluang menyebabkan anak masuk sekolah tidak teratur, meninggalkan sekolah sebelum menamatkannya. Penggunaan tenaga kerja anak untuk membantu pekerjaan orangtua sehari-hari, ketidakmampuan orangtua menyediakan alat-alat sekolah yang diperlukan anak, serta sikap apatis atau bahkan antipati orangtua terhadap manfaat atau nilai ekonomi sekolah.

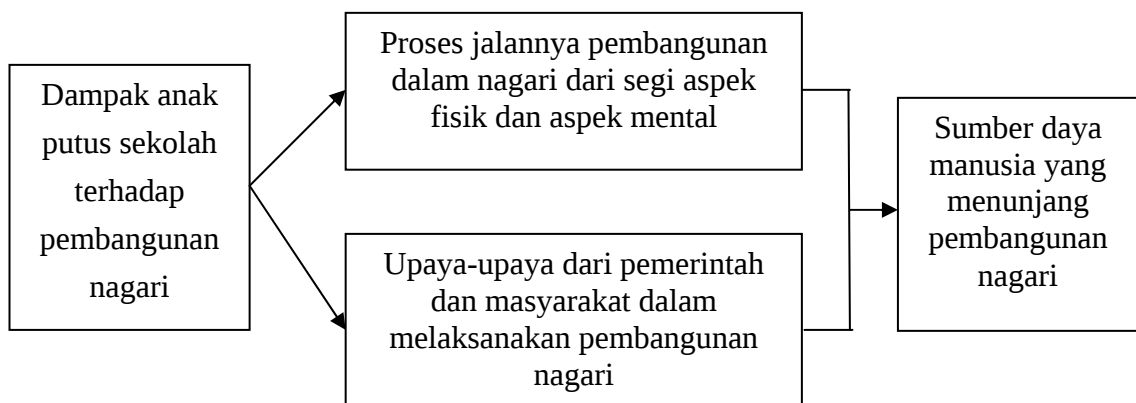
Vembrianto dalam Syauckani sejalan dengan itu, penelitian Ekstrom dalam Syauckani (2002;61) menemukan bahwa 20% dari siswa atau anak yang putus sekolah disebabkan faktor ekonomi. Temuan ini diperkuat hasil penelitian Kulstad dan Swings serta Rumberger yang menyimpulkan bahwa penyebab utama putus sekolah adalah status ekonomi orangtua yang rendah. Prayitno dalam Syauckani (2002;61).

Dilihat dari sudut lembaga penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan sekolah dan luar sekolah (UU SPN 1989), maka sebagaimana aspek pendidikan lainnya persoalan putus sekolah ini juga erat kaitannya dengan peranan orangtua, guru, dan masyarakat. Komponen-komponen itu memegang tanggung jawab terhadap pendidikan anak, yaitu mengupayakan agar anak tidak mengalami putus sekolah.

Dapat disimpulkan dari ide diatas bahwa peranan orangtua dalam pendidikan anak, terutama jika dikaitkan dengan perhatian orangtua dan bimbingan pendidikan yang diberikan orangtua telah banyak mengeluarkan untuk pendidikan anaknya, namun itu tidak menjamin keberhasilan pendidikan anak mereka.

B. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam mengembangkan hubungan antara konsep yang akan diteliti tujuannya adalah untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan peneliti sebab kerangka konseptual ini disusun berdasarkan kepada kerangka teoritis yang telah penulis susun. Berdasarkan kerangka konseptual akan jelas nampak ada beberapa objek dan konsep yang harus diteliti, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Bagaimana Dampak Anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari diKenagarian Gannggo hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka konseptual dibawah ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu tentang Dampak Anak Putus Sekolah Terhadap Pembangunan Nagari di Kenagarian Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Dampak anak putus sekolah terhadap Pembangunan nagari di Kenagarian Ganggo Hilir adalah pembangunan untuk masa yang akan datang terhambat. Generasi penerus bangsa yang akan membangun Nagari banyak yang tidak melanjutkan pendidikannya dan putus sekolah.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat setempat yaitu dengan menyediakan sarana dan prasaran untuk sekolah seperti : buku-buku gratis dari sekolah, uang sekolah ditiadakan, kualitas guru harus ditingkatkan, mempermudah kurikulum.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak anak-anak putus sekolah adalah kurangnya kesadaran dari anak dan orangtua untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi serta kurangnya dana orangtua untuk anaknya agar dapat sekolah.

B. SARAN-SARAN

1. Sebaiknya dalam mencegah anak putus sekolah selain kerja sama dengan orangtua, masyarakat juga bekerja sama dengan pihak pemerintah seperti Dinas pendidikan yang dapat menyediakan pustaka keliling agar anak

tersebut termotivasi untuk membaca dan dapat menambah pengetahuannya.

2. Peranan pemerintah dan masyarakat tidak saja membimbing anak-anak dan mencegah putus sekolah terhadap anak-anak saja. Namun dikembangkan dengan memperhatikan dan mengarahkan anak putus sekolah kearah yang lebih baik sehingga tidak membawa dampak negatif kepada anak yang bersekolah di kenagarian Ganggo Hilir
3. Kepada Wali Nagari berserta perangkatnya jalinlah kerja sama yang baik dengan berbagai unsur masyarakat dalam mencegah anak –anak putus sekolah dalam bentuk perbaiki gedung-gedung sekolah, mengadakan Bea Siswa bagi anak yang berprestasi dan anak yang kurang mampu.
4. Kepada Guru yang ada di kenagarian Ganggo Hilir dalam mengabdikan sebagai seorang Guru tetaplah jalin kerja sama dengan masyarakat dan orangtua agar anak-anak yang ada di kenagarian Ganggo Hilir bisa bersemangat lagi sekolah sehingga angka anak putus sekolah bisa berkurang dan bisa dihapuskan.
5. Peran ninik mamak dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dengan selalu mengajak anak-anak kearah yang lebih baik sehingga mereka bisa mengutamakan pendidikan dan nagari Ganggo Hilir bisa berangkat dari ketidak pedulian masyarakat terhadap pendidikan pembangunan nagari yang akan membawa perubahan dalam suatu nagari kearah yang lebih baik serta menjadikan masyarakat peduli akan pendidikan dan pembangunan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi (2004). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Abu Ahmadi (2004). *Psikologi Belajar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Burhan Bungin 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.274 hal.
- Boediono Jiyono, Indriyanto B, dan Swaryani, N. (1999). *Dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan dasar. Ringkasan Eksekutif Hasil Studi (Volume 1)*. Badan Penelitian dan Pengembangan, Departamen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat.(2002). *Profil Pendidikan*. Propinsi Sumatera Barat 2001/2002.
- Gusmal (2007). *Pendidikan Tanpa Akhir*, Padang : Padang Media.
- Hari Poerwanto (2005). *Kebudayaan dan Lingkungan dalam perspektif antropologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Idrus Hakimi (1991). *Pegangan Penghulu dan Pidato Pasambahan Adat MinangKabau*. Bandung.
- Khairuddin (2001). *Karakteristik Anak Putus Sekolah dan Peranan Guru Pembimbing. Skripsi Program Pasca Sarjana*, Universitas Negeri Padang.147 hal.
- Maleong (2002). *Penelitian kualitatif*, Jakarta : PT Remaja Rondakarya. 410 hal.
- Muhammad Fakhri Gaffar. (1994). *Pendidikan dan Penentasan Kemiskinan*. Bandung: Majalah Pendidikan No 2.
- Mohtar Mas'oe'd (1997). *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta : Pusat Penerbitan UII Press Yogyakarta
- Nasution (1982). *Metode Penelitian*, Jakarta : Jambatan.
- Nasution (1992). *Metode Penelitian Naturalistik- Kualitatif*, Bandung : Tarsito